

MBG sebagai Instrumen Politik Kesejahteraan: Studi Sosiologis tentang Relasi Negara dan Masyarakat

**Vanya Dyah Pitaloka M.A.C.R¹, Dewinta Rizky R. Hatu², Sahrain Bumulo³,
Mohamad Mantali⁴**

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo,
vanyadyah@ung.ac.id

² Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo,
dewinta@ung.ac.id

³ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo,
sahrain@ung.ac.id

⁴ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo,
mantali@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen politik kesejahteraan dalam membentuk relasi antara negara dan masyarakat dengan menggunakan perspektif State in Society dari Migdal dan politik kesejahteraan dari Hickey dan Lavers. Sebagian penelitian mengenai MBG masih berfokus pada aspek gizi, kesehatan, dan efektivitas implementasi program, sementara dimensi relasi negara dan masyarakat dalam praktik kesejahteraan belum banyak dikaji. Penelitian ini dilakukan di Desa Tabongo Barat, Kabupaten Gorontalo dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dukungan masyarakat terhadap MBG tidak sepenuhnya dibangun oleh keberhasilan program dalam mencapai tujuan, melainkan oleh manfaat material yang diterima berbagai aktor lokal. Namun, masyarakat tidak bertindak sebagai penerima manfaat yang pasif. Mereka tetap melakukan evaluasi, kritik, dan redistribusi informal terhadap manfaat program berdasarkan penilaian moral dan kebutuhan sosial yang mereka anggap lebih tepat. Penelitian ini menemukan bahwa MBG menjadi arena negosiasi antara definisi kesejahteraan yang dibangun negara dan kebutuhan kesejahteraan yang dipahami masyarakat. Dukungan terhadap program lebih banyak dibentuk oleh kalkulasi manfaat praktis dibandingkan oleh kepercayaan substantif terhadap kapasitas negara. Temuan ini menghasilkan konsep legitimasi semu yang terstruktur secara material untuk menjelaskan bentuk dukungan sosial yang muncul dari program kesejahteraan.

Kata kunci: Politik Kesejahteraan; Relasi Negara-Masyarakat; Legitimasi; MBG

1. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial yang menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan sosial Indonesia. Selain ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak, program ini merepresentasikan bentuk kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui distribusi sumber daya publik. Dalam perspektif sosiologi politik, kebijakan kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material warga negara, tetapi juga menjadi instrumen yang digunakan negara untuk membangun legitimasi dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, MBG dapat dipahami sebagai arena sosial tempat berlangsungnya interaksi, negosiasi, dan pertukaran kepentingan antara negara dan masyarakat. Perspektif *State in Society* yang dikembangkan oleh Migdal (2001) memandang bahwa relasi antara negara dan masyarakat terbentuk melalui praktik-praktik sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui implementasi kebijakan publik.

Secara nasional, pemerintah menargetkan MBG sebagai program unggulan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia dan percepatan penurunan stunting. Data Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional masih mencapai 19,8 persen pada tahun 2024, sehingga intervensi gizi menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional (BKPK Kementerian Kesehatan RI, 2024). Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp268 triliun untuk memperluas jangkauan program kepada peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (Badan Gizi Nasional, 2026). Di Desa Tabongo Barat, program ini mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat. Sebagian informan menilai bahwa MBG membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan akses pangan bagi anak-anak. Namun, sebagian lainnya mempertanyakan ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, serta bentuk bantuan yang dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Variasi respons tersebut menunjukkan bahwa implementasi program kesejahteraan tidak selalu menghasilkan penerimaan yang seragam, melainkan melibatkan proses penafsiran dan evaluasi yang berbeda-beda di tingkat lokal.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif *State in Society* dari Joel S. Migdal. Menurut Migdal (2001), negara bukanlah entitas yang berdiri terpisah dari masyarakat, melainkan hadir dan bekerja melalui berbagai praktik sosial yang melibatkan interaksi dengan aktor-aktor lokal. Kebijakan publik menjadi salah satu instrumen utama yang mempertemukan kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat. Dalam proses tersebut, masyarakat tidak hanya bertindak sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menerima, menafsirkan, mengkritik, maupun memodifikasi makna kebijakan sesuai dengan pengalaman sosial mereka. Perspektif ini memungkinkan penelitian melihat MBG tidak hanya sebagai program distribusi makanan bergizi, tetapi juga sebagai mekanisme yang membentuk relasi sosial dan politik antara negara dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana Program Makan Bergizi Gratis berfungsi sebagai instrumen politik kesejahteraan dalam membentuk relasi antara negara dan masyarakat di Desa Tabongo Barat, Kabupaten Gorontalo?

Pertanyaan ini penting untuk menjelaskan bagaimana kebijakan kesejahteraan bekerja di tingkat lokal, bagaimana masyarakat merespons kehadiran negara melalui program sosial, serta bagaimana legitimasi dan dukungan terhadap negara dibentuk melalui praktik kesejahteraan sehari-hari.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis untuk memahami bagaimana relasi antara negara dan masyarakat dikonstruksi melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendekatan konstruktivis memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna yang dibentuk melalui interaksi sosial (Schwandt, 2003). Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap penerima manfaat, petugas penyaluran MBG, serta aparat desa yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatannya dalam implementasi program. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan pemerintah, publikasi ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Penelitian dilaksanakan di Desa Tabongo Barat, Kabupaten Gorontalo, selama dua bulan, yaitu Mei–Juni 2026. Data dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi sosiologis, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi dinamika relasi negara dan masyarakat dalam pelaksanaan Program MBG.

3. ANALISIS DATA

3.1. MBG sebagai Mekanisme Kehadiran Negara dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk intervensi negara yang menghadirkan kebijakan kesejahteraan secara langsung dalam ruang kehidupan masyarakat. Berbeda dengan berbagai program bantuan yang disalurkan secara periodik, MBG menghadirkan negara melalui aktivitas yang bersifat rutin dan berulang, yaitu penyediaan makanan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kehadiran negara dalam bentuk seperti ini penting karena memungkinkan warga berinteraksi secara langsung dengan hasil kebijakan yang diproduksi negara. Sebagian besar informan mengakui bahwa program ini memberikan manfaat tertentu bagi keluarga mereka. Seorang informan menjelaskan *"Kalau menurut saya program ini bagus karena membantu orang tua. Anak-anak sudah dapat makanan jadi kami tidak terlalu pikir bekal lagi."* (Laila Ladamara, Desa Tabongo Barat, 31 Mei 2026)

Dalam perspektif negara kesejahteraan, distribusi bantuan sosial tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan material warga negara, tetapi juga menjadi sarana membangun legitimasi negara melalui penyediaan pelayanan publik (Esping-Andersen, 1990; Béland dan Morgan, 2021). Melalui MBG, negara berupaya menunjukkan kapasitasnya dalam menjawab persoalan gizi sekaligus memperkuat kedekatan simbolik dengan masyarakat. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa manfaat tersebut tidak dirasakan secara merata oleh seluruh penerima. Sebagian orang tua tetap harus mengeluarkan biaya tambahan karena anak-anak mereka tidak mengonsumsi makanan yang disediakan program.

Aku rasa sih tidak ada perubahan, karena aku tetap bikin bekal untuk anak, yang dia mau makan. Soalnya mereka cukup picky eater kan. Kalau di sekolah dia tidak mau makan itu MBG, kan kasihan dia lapar. Jadi aku tetap ikut yang dia mau (Echa Hadju (Echa Hadju, Desa Tabongo Barat, 1 Juni 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa asumsi negara mengenai hubungan linear antara penyediaan makanan dan penghematan pengeluaran rumah tangga tidak selalu terjadi dalam praktik. Dalam kerangka *State in Society*, Migdal (2001) menjelaskan bahwa kebijakan negara selalu berhadapan dengan struktur sosial yang telah lebih dahulu hidup dalam masyarakat. Preferensi konsumsi anak, pola pengasuhan keluarga, serta kebiasaan makan menjadi faktor yang memediasi efektivitas program. Dengan demikian, manfaat MBG tidak melekat secara otomatis pada kebijakan, melainkan merupakan hasil interaksi antara desain negara dan praktik sosial masyarakat. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa kehadiran negara melalui kebijakan kesejahteraan bersifat kondisional. Negara hadir, tetapi efektivitas kehadiran tersebut bergantung pada kemampuan kebijakan menyesuaikan diri dengan realitas sosial penerima manfaat.

3.2. Standarisasi Kebijakan dan Keragaman Kebutuhan Masyarakat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diselenggarakan melalui mekanisme penyediaan makanan yang mengacu pada standar menu, porsi, dan tata kelola yang telah ditetapkan pemerintah. Standarisasi tersebut dirancang untuk mendukung konsistensi pelaksanaan program, mempermudah proses distribusi, serta memastikan bahwa penerima manfaat memperoleh layanan dengan kualitas yang relatif setara. Melalui pendekatan tersebut, negara berupaya membangun sistem distribusi yang efisien sehingga program dapat dilaksanakan secara serentak pada berbagai wilayah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program di tingkat lokal memperlihatkan dinamika yang tidak selalu sejalan dengan desain kebijakan. Data di Desa Tabongo Barat menunjukkan bahwa dari 54 penerima manfaat yang terdaftar, rata-rata hanya sekitar 25 orang yang mengambil makanan pada setiap hari distribusi. Selain itu, sebagian makanan yang dibagikan di sekolah tidak habis dikonsumsi, terutama oleh siswa perempuan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tersedianya layanan belum tentu diikuti oleh tingkat pemanfaatan yang sama pada seluruh penerima manfaat. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan:

Kalau saya punya anak tetap jajan di sekolah. Mungkin karena porsinya juga kurang untuk dorang yang laki-laki, yang perempuan sepertinya cukup. Kadang malah tidak habis (Ria Ristanti Desa Tabongo Barat, 31 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara desain kebijakan yang dibangun berdasarkan standar administratif dengan realitas sosial yang berkembang di tingkat masyarakat. Scott (1998) menjelaskan bahwa negara cenderung menyusun kebijakan melalui proses *legibility*, yaitu penyederhanaan realitas sosial ke dalam kategori-kategori yang dapat dipetakan, diukur, dan dikelola secara administratif. Pendekatan tersebut memungkinkan negara menjalankan program dalam skala besar secara lebih efisien, namun pada saat yang

sama berpotensi mengurangi sensitivitas kebijakan terhadap keragaman kondisi sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaan MBG, standarisasi menu dan porsi menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi pelayanan. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap layanan tersebut tidak bersifat seragam. Perbedaan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kebiasaan konsumsi, serta kondisi ekonomi keluarga memengaruhi cara setiap penerima memanfaatkan makanan yang diberikan. Sebagian siswa masih membeli makanan tambahan di sekolah karena merasa porsi yang diterima belum mencukupi kebutuhan mereka, sedangkan pada kelompok lain justru terdapat makanan yang tidak dikonsumsi hingga menimbulkan sisa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keseragaman dalam penyediaan layanan belum tentu menghasilkan tingkat pemanfaatan yang sama pada seluruh kelompok penerima.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan Béland dan Morgan (2021) yang menyatakan bahwa tantangan implementasi kebijakan kesejahteraan modern tidak lagi hanya berkaitan dengan perluasan cakupan penerima manfaat, tetapi juga dengan kemampuan tata kelola kebijakan untuk merespons keragaman kebutuhan masyarakat. Efektivitas program kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi negara mengadaptasikan implementasi kebijakan terhadap karakteristik sosial yang berkembang di tingkat lokal. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu menghasilkan manfaat yang relevan bagi kelompok sasaran.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan implementasi MBG tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis distribusi, melainkan juga dengan bagaimana standar kebijakan berinteraksi dengan keragaman kebutuhan masyarakat. Migdal (2001) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan selalu merupakan hasil perjumpaan antara logika birokrasi negara dan praktik sosial masyarakat. Negara dapat merancang standar pelayanan untuk menjamin efisiensi dan pemerataan, tetapi makna, penerimaan, dan efektivitas kebijakan pada akhirnya dibentuk melalui pengalaman masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut di tingkat lokal. Dengan demikian, implementasi MBG menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kesejahteraan tidak hanya bergantung pada kapasitas negara dalam mendistribusikan bantuan, tetapi juga pada kemampuannya memahami dan mengakomodasi dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

3.3. Politik Kesejahteraan dan Produksi Kepentingan Material

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa MBG tidak hanya menghasilkan manfaat bagi penerima program, tetapi juga menciptakan kepentingan ekonomi baru bagi aktor-aktor yang terlibat dalam implementasinya. Ketika ditanya mengenai hal pertama yang terlintas ketika mendengar Program Makan Bergizi Gratis, seorang petugas penyaluran menjawab "*Tambahan penghasilan.*" (Oon, Desa Tabongo Barat, 30 Mei 2026)

Jawaban tersebut memperlihatkan bahwa MBG tidak hanya mendistribusikan makanan, tetapi juga mendistribusikan insentif ekonomi kepada para pelaksana program. Dalam kajian politik kesejahteraan, kondisi semacam ini dikenal sebagai pembentukan *welfare constituency*,

yaitu munculnya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan program karena memperoleh manfaat langsung darinya (Hickey dkk., 2020). Implikasinya menjadi penting ketika informan yang sama menjelaskan bagaimana ia merespons keluhan masyarakat terkait kualitas makanan. *"Mereka cuma bilang ohiya. Menunya sudah begitu dari sana."* (Oon, Desa Tabongo Barat, 30 Mei 2026)

Tidak adanya tindak lanjut yang lebih serius menunjukkan adanya persoalan akuntabilitas dalam implementasi program. Secara teoritis, situasi ini dapat dijelaskan melalui konsep *street-level bureaucracy* yang dikembangkan Lipsky (2010). Aktor pelaksana di tingkat bawah sering berada pada posisi ambigu: mereka berfungsi sebagai representasi negara di hadapan masyarakat, tetapi pada saat yang sama memiliki kepentingan praktis yang dapat memengaruhi cara mereka menjalankan kebijakan. Karena itu, relasi negara dan masyarakat dalam MBG tidak hanya dibentuk oleh distribusi manfaat kepada penerima, tetapi juga oleh kepentingan material yang berkembang di kalangan pelaksana program. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan menghasilkan jaringan kepentingan sosial yang lebih kompleks daripada yang sering diasumsikan dalam desain kebijakan.

3.4. Masyarakat sebagai Aktor Kritis dalam Relasi Negara dan Masyarakat

Temuan paling penting dalam penelitian ini adalah munculnya kapasitas reflektif masyarakat dalam mengevaluasi program. Berbeda dengan asumsi yang menempatkan penerima bantuan sebagai kelompok pasif, orang tua penerima manfaat di Desa Tabongo Barat menunjukkan kemampuan yang cukup tinggi dalam menilai efektivitas kebijakan publik. Salah seorang informan menyatakan:

Boleh aku bilang aku tidak terlalu mendukung MBG? Aku tidak terlalu mendukung MBG soalnya daripada alokasi dana kasih untuk makanan, lebih baik untuk bantuan lain, karena banyak kan anak-anak yang tidak makan juga. Banyak nasi yang terbuang. Mungkin kalopun mau kasih MBG, hanya untuk yang membutuhkan saja, jangan semua anak dapat." (Echa Hadju, Desa Tabongo Barat, 1 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai manfaat yang diterima, tetapi juga mempertanyakan rasionalitas kebijakan secara keseluruhan. Informan secara eksplisit membandingkan biaya yang dikeluarkan negara dengan manfaat yang dihasilkan program. Bahkan ia menawarkan alternatif kebijakan yang menurutnya lebih tepat sasaran. Kritik serupa muncul ketika informan menghitung nilai ekonomi makanan yang diterima. *"Kalau aku hitung jadinya tidak sampai 5.000 per hari. Harusnya dengan 15.000 kita sudah dapat ayam lalapan dengan es teh manis"* (Echa Hadju, Desa Tabongo Barat, 1 Juni 2026)

Temuan ini memperlihatkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap program kesejahteraan tidak selalu identik dengan meningkatnya kepercayaan kepada negara. Yang dan Shen (2021) menunjukkan bahwa masyarakat dapat tetap menerima manfaat program sosial, namun secara bersamaan mempertahankan sikap kritis terhadap efektivitas maupun kualitas kebijakan yang diberikan pemerintah. Selain itu dapat terlihat pula bahwa masyarakat melakukan apa yang dapat disebut sebagai informal policy audit. Mereka tidak menerima begitu saja klaim negara mengenai efektivitas program, tetapi melakukan evaluasi berdasarkan

pengalaman konsumsi sehari-hari. Dalam perspektif Migdal (2001), kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan objek yang pasif dalam relasi dengan negara. Sebaliknya, masyarakat merupakan aktor yang memiliki kapasitas untuk menerima, menafsirkan, mengoreksi, dan bahkan menegosiasikan kebijakan negara. Oleh karena itu, relasi yang terbentuk melalui MBG bukan relasi dominasi sepihak, melainkan relasi negosiatif yang terus diproduksi melalui praktik keseharian

3.5. MBG dan Relasi Negara-Masyarakat dalam Politik Kesejahteraan

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berfungsi sebagai instrumen politik kesejahteraan yang membentuk relasi antara negara dan masyarakat melalui proses yang jauh lebih kompleks daripada sekadar distribusi bantuan makanan. Negara berupaya membangun legitimasi melalui penyediaan kesejahteraan, tetapi legitimasi tersebut tidak diterima secara otomatis oleh masyarakat. Sebaliknya, masyarakat secara aktif mengevaluasi manfaat program, mempertanyakan ketepatan sasaran, menghitung efisiensi anggaran, serta menilai kualitas layanan yang diberikan negara. Pada saat yang sama, implementasi program juga menghasilkan kepentingan material baru di kalangan pelaksana yang turut memengaruhi dinamika akuntabilitas program.

Temuan ini sejalan dengan Roosma (2021) yang menjelaskan bahwa legitimasi negara kesejahteraan tidak semata-mata dibangun melalui keberadaan program sosial, tetapi melalui penilaian masyarakat terhadap keadilan, efektivitas, dan manfaat nyata yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Dengan kata lain, distribusi bantuan sosial tidak secara otomatis menghasilkan kepercayaan kepada negara. Legitimasi baru terbentuk ketika masyarakat menilai bahwa kebijakan mampu menjawab kebutuhan mereka secara adil, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, meskipun sebagian besar informan mengakui manfaat MBG dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, mereka tetap menyampaikan kritik terhadap kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima, serta efisiensi penggunaan anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan terhadap program tidak identik dengan penerimaan tanpa kritik terhadap negara.

Lebih lanjut, Béland dan Morgan (2021) menjelaskan bahwa kebijakan kesejahteraan modern tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial, tetapi juga menjadi arena politik yang mempertemukan kepentingan negara, birokrasi, dan masyarakat. Implementasi kebijakan kesejahteraan selalu melibatkan proses negosiasi mengenai siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana manfaat tersebut didistribusikan, dan bagaimana masyarakat menilai kinerja negara melalui pelayanan yang diberikan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa MBG tidak hanya menghasilkan manfaat bagi kelompok sasaran, tetapi juga menciptakan kepentingan material baru di kalangan pelaksana program yang pada akhirnya memengaruhi dinamika akuntabilitas dan respons terhadap berbagai kritik masyarakat. Dengan demikian, politik kesejahteraan dalam MBG tidak berhenti pada proses distribusi bantuan, tetapi juga membentuk relasi sosial dan kepentingan baru di tingkat lokal.

Temuan tersebut sekaligus memperkuat tesis Migdal (2001) bahwa relasi negara dan masyarakat selalu berlangsung melalui proses negosiasi yang terus-menerus. Negara berupaya membentuk masyarakat melalui kebijakan kesejahteraan, sementara masyarakat secara simultan menerima, menafsirkan, mengevaluasi, bahkan mengoreksi kebijakan berdasarkan pengalaman sosial yang mereka miliki. Dalam perspektif ini, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas negara dalam mendistribusikan sumber daya, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memaknai dan merespons kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, MBG tidak hanya dapat dipahami sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai arena politik kesejahteraan tempat negara berupaya membangun legitimasi melalui distribusi manfaat, sementara masyarakat secara aktif menguji klaim-klaim kesejahteraan tersebut melalui pengalaman empiris mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap MBG lebih banyak didasarkan pada manfaat praktis yang dirasakan masyarakat daripada pada kepercayaan penuh terhadap kapasitas negara. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa legitimasi yang dibangun melalui program kesejahteraan bersifat dinamis, terus dinegosiasikan, dan bergantung pada kemampuan negara menghadirkan manfaat yang dinilai relevan oleh masyarakat.

4. KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memperluas kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui penyediaan makanan bagi anak sekolah dan kelompok sasaran lainnya. Kehadiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi mekanisme politik kesejahteraan yang memungkinkan negara membangun legitimasi sosial melalui distribusi manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh warga. Di Desa Tabongo Barat, program ini diterima secara positif oleh sebagian masyarakat karena dianggap mampu membantu kebutuhan keluarga dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Namun, manfaat tersebut tidak berlangsung secara universal dan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh penerima.

Realitas lapangan memperlihatkan bahwa efektivitas MBG sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial yang beragam. Sebagian keluarga memperoleh penghematan pengeluaran, sementara keluarga lain tetap harus menyediakan bekal tambahan karena anak tidak mengonsumsi makanan yang disediakan. Pada saat yang sama, muncul persoalan terkait kesesuaian menu, standar porsi, dan ketepatan sasaran yang menunjukkan adanya jarak antara desain kebijakan yang dirumuskan negara dengan kebutuhan nyata masyarakat. Situasi ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan bukan sekadar persoalan distribusi sumber daya, melainkan juga menyangkut kemampuan kebijakan memahami keragaman praktik dan pengalaman sosial penerima manfaat.

Relasi yang terbentuk melalui MBG tidak mencerminkan hubungan satu arah antara negara sebagai pemberi bantuan dan masyarakat sebagai penerima pasif. Masyarakat secara aktif menilai kualitas program, menghitung manfaat ekonomi yang diperoleh, mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran, bahkan menawarkan alternatif kebijakan yang dianggap lebih tepat. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa warga memiliki kapasitas reflektif untuk mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan pengalaman sosial mereka sendiri. Dalam konteks ini, dukungan terhadap program tidak identik dengan penerimaan tanpa kritik. Dukungan dan kritik justru hadir secara bersamaan sebagai bagian dari proses negosiasi antara negara dan masyarakat.

Dinamika tersebut menegaskan bahwa MBG merupakan arena interaksi antara logika negara dan logika masyarakat. Negara berupaya membangun legitimasi melalui distribusi kesejahteraan, sementara masyarakat secara simultan menerima, menafsirkan, mengoreksi, dan menegosiasikan bentuk kesejahteraan yang ditawarkan. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat atau volume distribusi makanan, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan sosial yang beragam, memperkuat akuntabilitas pelaksanaan, dan membuka ruang bagi evaluasi dari masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan kesejahteraan.

REFERENSI

- Badan Gizi Nasional. (30 Maret 2026). "BGN: Dari Rp268T, 93% Anggaran Digunakan Langsung untuk Bantuan MBG." (Siaran Pers, 30 Maret 2026). Jakarta, Badan Gizi Nasional. Diakses pada 2 Juni 2026 di <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-dari-rp268t-93-anggaran-digunakan-langsung-untuk-bantuan-mbg>
- Béland, Daniel, dan Kimberly Jane Morgan. 2021. "Governance." Dalam Daniel Béland, Stephan Leibfried, Kimberly Jane Morgan, Herbert Obinger, dan Christopher Pierson (Ed.), *The Oxford Handbook of the Welfare State*. Edisi Kedua (Bab 10, hlm. 173–187). Oxford, Oxford University Press.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (27 Mei 2025). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dalam Angka. Jakarta, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses pada <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2024/>
- Esping-Andersen, Gøsta. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press.
- Roosma, Femke. 2021. "The Social Legitimacy of European Welfare States After the Age of Austerity." Dalam Bent Greve (Ed.), *Handbook on Austerity, Populism and the Welfare State*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Hickey, Samuel, Tom, Lavers, Miguel Niño-Zarazúa, dan Jeremy Seekings. 2020. *The Politics of Social Protection in Eastern and Southern Africa*. Oxford: Oxford University Press.
- Lipsky, Michael. 2010. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Migdal, Joel, Samuel. 2001. *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schwandt, Thomas, A. 2003. Three Epistemological Stances for Qualitative Inquiry: Interpretivism, Hermeneutics, and Social Constructionism." Dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Ed.), *The Landscape of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Scott, James, C. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.